



# Pelestarian Lingkungan dalam Kebijakan Ekstraktif di Taman Nasional Yasuní (2013–2023): Studi Kualitatif Berbasis Analisis Dokumen

Angela del Carmen Akijuwen  
Universitas Kristen Indonesia Jakarta

## Email

[del\\_carmen@syriacorthodoxchurch.id](mailto:del_carmen@syriacorthodoxchurch.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelestarian lingkungan dalam kebijakan ekstraktif di Taman Nasional Yasuní, Ekuador, selama periode 2013–2023. Fokus utama penelitian adalah memahami bagaimana kebijakan negara yang berbasis eksploitasi minyak memengaruhi keberlanjutan ekologis dan sosial di kawasan dengan biodiversitas tinggi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan analisis dokumen, yang bersumber dari jurnal akademik, laporan kebijakan, serta publikasi organisasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan berada dalam tekanan struktural akibat dominasi kebijakan ekstraktif dan ketergantungan ekonomi terhadap minyak. Kawasan Yasuni yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi menghadapi ancaman serius dari eksploitasi sumber daya dan pembangunan infrastruktur terkait (Bass et al., 2010). Selain itu, konflik sosial dan tekanan terhadap masyarakat adat memperkuat kompleksitas masalah lingkungan (Finer et al., 2009). Penelitian ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan memerlukan perubahan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan partisipatif.

**Kata-kunci:** Ekstraktif, Kebijakan, Pelestarian Lingkungan, Taman Nasional Yasuní, Yasuní

## Received:

March/30/2026

## Accepted:

April/29/2026

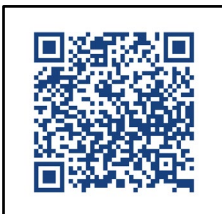
## Published:

May/21/2026

## ABSTRACT

*This study aims to analyze environmental conservation within extractive policies in Yasuni National Park, Ecuador, during the 2013–2023 period. The main focus of the research is to understand how state policies based on oil exploitation affect ecological and social sustainability in an area with high biodiversity. The study employs a qualitative approach using case studies and document analysis, drawing from academic journals, policy reports, and publications from related organizations. The findings indicate that environmental conservation is under structural pressure due to the dominance of extractive policies and economic dependence on oil. The Yasuni area, which possesses high biodiversity, faces serious threats from resource exploitation and related infrastructure development (Bass et al., 2010). In addition, social conflicts and pressure on indigenous communities further intensify environmental problems (Finer et al., 2009). This study emphasizes that environmental conservation requires more sustainable and participatory policy changes.*

**Keywords:** Extractive, Environmental Conservation, Policy, Yasuni, Yasuni National Park.



## Pendahuluan

Eksplorasi sumber daya alam di kawasan konservasi menjadi isu penting dalam studi lingkungan global karena sering menimbulkan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Sovacool & Scarpaci, 2016). Fenomena ini banyak terjadi di negara berkembang yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor ekstraktif sebagai sumber utama pendapatan negara (Gidron & Hall, 2020). Dalam konteks tersebut, kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi seperti hutan hujan tropis menjadi rentan terhadap tekanan eksploitasi (Bass et al., 2010). Selain itu, aktivitas ekstraktif sering dikaitkan dengan dampak ekologis seperti deforestasi, degradasi habitat, dan hilangnya biodiversitas (Finer et al., 2009). Oleh karena itu, konflik antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi karakteristik utama dalam pengelolaan sumber daya alam di era modern (Brubaker, 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa eksploitasi minyak di kawasan konservasi memiliki implikasi yang luas, baik secara ekologis maupun sosial (Kimerling, 2013). Studi mengenai Yasuni menegaskan bahwa kebijakan ekstraktif sering kali mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan hak masyarakat adat (Larrea & Warnars, 2009). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa inisiatif seperti Yasuni-ITT merupakan upaya inovatif dalam mengintegrasikan pembangunan dan konservasi (Espinosa, 2013). Namun, kegagalan implementasi kebijakan tersebut menunjukkan adanya keterbatasan dalam dukungan internasional dan komitmen politik domestik (Martin & Scholz, 2014). Literatur juga menekankan bahwa konflik lingkungan tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga terkait dengan dinamika kekuasaan dan kebijakan negara (Bonikowski, 2019).

Dalam perspektif akademik, Green Theory menempatkan lingkungan sebagai elemen sentral dalam analisis hubungan internasional dan kebijakan publik (Eckersley, 2007). Pendekatan ini menekankan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan dan struktur ekonomi global (Mudde & Kaltwasser, 2017). Selain itu, konsep modernisasi refleksif menjelaskan bahwa risiko lingkungan merupakan konsekuensi dari proses pembangunan itu sendiri (Inglehart & Norris, 2019). Studi lain juga menunjukkan bahwa keadilan lingkungan menjadi aspek penting dalam menilai dampak kebijakan terhadap kelompok rentan seperti masyarakat adat (Breskaya et al., 2018). Dengan demikian, pendekatan interdisipliner diperlukan untuk memahami kompleksitas konflik lingkungan secara komprehensif (Leofreddi, 2023).

Dalam praktik kebijakan, berbagai negara telah mencoba mengembangkan pendekatan alternatif untuk menyeimbangkan pembangunan dan pelestarian lingkungan (UNDP, 2012). Inisiatif Yasuni-ITT di Ekuador menjadi salah satu contoh implementasi kebijakan inovatif yang menggabungkan konservasi dan kompensasi internasional (Espinosa, 2013). Namun, implementasi kebijakan tersebut menghadapi tantangan berupa keterbatasan pendanaan dan perbedaan kepentingan antar aktor (Rival, 2010). Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa tekanan masyarakat sipil dan komunitas global semakin memengaruhi arah kebijakan lingkungan (Rights of Nature Tribunal, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa praktik kebijakan lingkungan terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran global terhadap isu keberlanjutan (Weyland, 2021).

Secara umum, literatur menunjukkan bahwa konflik antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian lingkungan merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional (Stanley, 2018). Terdapat konsensus bahwa ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif menjadi faktor utama yang memengaruhi kebijakan negara (Norris & Inglehart, 2019). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelestarian lingkungan sangat bergantung pada integrasi antara kebijakan nasional dan dukungan internasional (Pappas, 2019). Literatur juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dan perlindungan hak komunitas lokal dalam pengelolaan lingkungan (Smith,

2020). Dengan demikian, pelestarian lingkungan dipahami sebagai isu yang tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi secara simultan (Rooduijn, 2019).

Meskipun studi mengenai konflik lingkungan dan eksploitasi minyak di kawasan konservasi telah berkembang, masih terdapat keterbatasan dalam memahami secara spesifik bagaimana pelestarian lingkungan diposisikan dalam kebijakan ekstraktif negara (Arsel & Pellegrini, 2024). Banyak penelitian lebih menyoroti konflik secara umum tanpa menguraikan mekanisme kebijakan yang secara langsung memengaruhi konservasi (Lessmann et al., 2016). Selain itu, hubungan antara kebijakan negara dan keberlanjutan ekologis sering dianalisis secara parsial (Pérez Rincón et al., 2019). Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika pelestarian lingkungan dalam konteks kebijakan ekstraktif (Dayot, 2023). Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk memperdalam analisis yang lebih terintegrasi antara kebijakan dan lingkungan.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan ketidakseimbangan fokus yang lebih menekankan pada dampak ekologis dibandingkan analisis kebijakan (Sovacool & Scarpaci, 2016). Sebagian besar studi menyoroti deforestasi dan kerusakan biodiversitas tanpa mengkaji secara mendalam peran aktor politik dalam proses tersebut (Kimerling, 2013). Selain itu, penelitian sering berfokus pada perspektif global tanpa memperhatikan dinamika lokal di tingkat komunitas (Larrea & Warnars, 2009). Akibatnya, interaksi antara kebijakan negara dan masyarakat adat kurang mendapatkan perhatian yang memadai (Villasante et al., 2025). Ketidakseimbangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dan multidimensional.

Dari segi cakupan, penelitian mengenai Yasuní masih terbatas pada periode tertentu dan belum banyak mengkaji perkembangan terbaru, khususnya pasca referendum 2023 (Arsel & Pellegrini, 2024). Banyak studi berfokus pada periode awal Inisiatif Yasuní-ITT tanpa memperhatikan dinamika kebijakan setelah kegagalannya (Martin & Scholz, 2014). Selain itu, kajian yang menghubungkan perubahan kebijakan dengan implikasi jangka panjang terhadap pelestarian lingkungan masih terbatas (Lessmann et al., 2016). Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman tentang evolusi kebijakan dalam jangka panjang (Pérez Rincón et al., 2019). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mencakup periode yang lebih luas dan terkini.

Kekosongan analisis juga terlihat pada kurangnya perhatian terhadap variabel kebijakan sebagai faktor utama dalam pelestarian lingkungan (Dayot, 2023). Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek ekologis dan sosial tanpa mengintegrasikan analisis kebijakan secara sistematis (Arsel & Pellegrini, 2024). Selain itu, variabel seperti peran negara, aktor non-negara, dan dinamika kekuasaan belum dianalisis secara mendalam dalam satu kerangka yang utuh (Pérez Rincón et al., 2019). Hal ini mengakibatkan pemahaman yang terfragmentasi terhadap konflik lingkungan (Lessmann et al., 2016). Kekosongan ini membuka ruang untuk pendekatan analitis yang lebih komprehensif.

Berdasarkan berbagai keterbatasan tersebut, diperlukan penelitian baru yang secara khusus menganalisis pelestarian lingkungan dalam kerangka kebijakan ekstraktif (Dayot, 2023). Penelitian ini perlu mengintegrasikan analisis kebijakan, dinamika sosial, dan dampak ekologis dalam satu kerangka konseptual (Arsel & Pellegrini, 2024). Selain itu, penting untuk memasukkan perspektif masyarakat lokal dan aktor non-negara dalam analisis (Villasante et al., 2025). Kajian ini juga perlu memperhatikan perkembangan terbaru kebijakan lingkungan di Ekuador (Lessmann et al., 2016). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam studi pelestarian lingkungan dan kebijakan ekstraktif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelestarian lingkungan dalam konteks kebijakan ekstraktif di Taman Nasional Yasuní secara lebih komprehensif. Fokus utama diarahkan pada

bagaimana kebijakan negara memengaruhi keberlanjutan ekologis dan sosial di kawasan tersebut (Arsel & Pellegrini, 2024). Selain itu, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara kepentingan ekonomi dan praktik konservasi lingkungan dalam konteks negara berkembang (Lessmann et al., 2016). Tujuan ini dirancang untuk menjawab keterbatasan studi sebelumnya yang belum mengintegrasikan analisis kebijakan secara mendalam (Dayot, 2023). Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih sistematis terhadap dinamika pelestarian lingkungan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis dokumen. Metode ini dipilih karena mampu menggali makna kebijakan dan dinamika sosial secara mendalam (Flyvbjerg, 2021). Analisis dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari jurnal, laporan kebijakan, dan dokumen resmi yang relevan (Fairclough, 2013). Pendekatan ini juga memungkinkan interpretasi terhadap relasi kekuasaan dan struktur kebijakan yang memengaruhi lingkungan (Joas, 2020). Dengan demikian, metode ini sesuai untuk menjawab kompleksitas isu yang diteliti.

Fokus analisis penelitian ini terletak pada hubungan antara kebijakan ekstraktif dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan negara membentuk praktik eksploitasi dan dampaknya terhadap ekosistem (Pérez Rincón et al., 2019). Selain itu, analisis juga mencakup peran aktor seperti pemerintah, masyarakat adat, dan organisasi lingkungan (Villasante et al., 2025). Fokus ini memungkinkan identifikasi pola konflik dan dinamika kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam (Gidron & Hall, 2020). Dengan demikian, penelitian ini memberikan analisis yang lebih terarah dan mendalam.

Penelitian ini penting karena memberikan perspektif baru dalam memahami konflik antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Isu ini menjadi semakin relevan seiring meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam di kawasan biodiversitas tinggi (Brubaker, 2020). Selain itu, penelitian ini membantu menjelaskan bagaimana kebijakan dapat memperkuat atau justru melemahkan upaya konservasi (Bonikowski, 2019). Pemahaman ini penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih berkelanjutan (Norris & Inglehart, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi akademik dan praktis.

Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah pengembangan kerangka analisis yang mengintegrasikan kebijakan, lingkungan, dan dinamika sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas kajian tentang pelestarian lingkungan dalam konteks ekstraktivisme (Leofreddi, 2023). Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengambilan kebijakan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan (Pappas, 2019). Kajian ini juga memberikan kontribusi dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam studi lingkungan (Stanley, 2018). Dengan demikian, penelitian ini menawarkan nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pelestarian lingkungan dalam kebijakan ekstraktif di Taman Nasional Yasuní, Ekuador, selama periode 2013–2023. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap dinamika kebijakan, konflik lingkungan, dan relasi antara aktor yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Taman Nasional Yasuní dipilih sebagai kasus karena merepresentasikan konflik antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan dalam konteks negara berkembang yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap sektor ekstraktif.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari jurnal akademik bereputasi, buku ilmiah, laporan lembaga internasional, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi organisasi lingkungan yang relevan dengan isu Yasuní. Data tersebut digunakan untuk menelusuri perkembangan kebijakan, dinamika konflik, dampak ekologis dan sosial, serta respons aktor yang terlibat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis. Sumber-sumber yang digunakan dipilih berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan keterbaruan untuk memastikan validitas data penelitian.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, dibandingkan, dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi pola kebijakan, hubungan antar variabel, serta implikasi kebijakan terhadap pelestarian lingkungan. Analisis ini juga menggunakan kerangka Green Theory untuk memahami hubungan antara negara, masyarakat, dan lingkungan dalam konteks kebijakan ekstraktif.

Melalui pendekatan ini, penelitian mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana pelestarian lingkungan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan sosial dalam konteks eksploitasi sumber daya alam di Taman Nasional Yasuní.

## Hasil Temuan

Aspek Analisis	Temuan Utama	Dampak terhadap Pelestarian Lingkungan	Implikasi
Ketergantungan Ekonomi	Ekuador bergantung pada minyak sebagai sumber utama pendapatan negara	Kebijakan cenderung mengutamakan eksploitasi dibanding konservasi	Pelestarian lingkungan menjadi prioritas sekunder
Kebijakan Negara	Pembatalan Inisiatif Yasuní-ITT (2013) dan normalisasi eksploitasi	Terjadi peningkatan aktivitas ekstraktif di kawasan konservasi	Terjadi kontradiksi antara kebijakan lingkungan dan ekonomi
Dampak Ekologis	Deforestasi, fragmentasi habitat, dan ancaman terhadap biodiversitas tinggi	Penurunan kualitas ekosistem dan risiko kerusakan jangka panjang	Kebutuhan perlindungan lingkungan semakin mendesak
Dampak Sosial	Tekanan terhadap masyarakat adat dan perubahan ruang hidup	Terjadi konflik sosial dan ketidakadilan lingkungan	Perlunya perlindungan hak masyarakat adat
Aktor dan Respons	Masyarakat adat, LSM, dan komunitas internasional melakukan resistensi	Meningkatkan tekanan politik terhadap pemerintah	Isu lingkungan menjadi agenda publik dan global
Resolusi Konflik	Referendum nasional 2023 menghentikan eksploitasi di Blok ITT	Meningkatkan legitimasi pelestarian lingkungan	Menjadi titik balik kebijakan berbasis partisipasi publik
Tantangan Implementasi	Ketergantungan ekonomi dan keterbatasan institusi	Implementasi kebijakan belum optimal	Diperlukan strategi pembangunan non-ekstraktif

Tabel. Analisis Pelestarian Lingkungan dalam Kebijakan Ekstraktif di Taman Nasional Yasuní (2013-2023)

Penelitian ini menemukan bahwa pelestarian lingkungan di Taman Nasional Yasuní berada dalam tekanan struktural yang kuat akibat ketergantungan ekonomi Ekuador terhadap sektor minyak. Data menunjukkan bahwa sejak pembatalan Inisiatif Yasuní-ITT pada tahun 2013, kebijakan negara cenderung kembali pada pendekatan ekstraktif yang memprioritaskan stabilitas fiskal dibanding perlindungan lingkungan. Kondisi ini menempatkan pelestarian lingkungan sebagai agenda yang

bersifat sekunder dalam praktik kebijakan publik.

Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa konflik lingkungan di Yasuní bersifat multidimensional, mencakup aspek ekologis, sosial, dan politik. Aktivitas eksploitasi minyak terbukti memicu deforestasi, fragmentasi habitat, serta peningkatan tekanan terhadap keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di kawasan tersebut. Di sisi lain, masyarakat adat mengalami tekanan terhadap ruang hidup, sistem sosial, dan keberlanjutan budaya akibat ekspansi industri ekstraktif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan negara tidak sepenuhnya mempertimbangkan prinsip keadilan lingkungan, khususnya dalam perlindungan hak masyarakat adat. Proses pengambilan keputusan cenderung bersifat top-down dan belum secara optimal menerapkan prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan. Hal ini memperkuat ketimpangan antara kepentingan negara dan kebutuhan komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, respons terhadap eksploitasi minyak menunjukkan adanya mobilisasi aktor yang luas, baik di tingkat domestik maupun internasional. Masyarakat adat, organisasi lingkungan, dan komunitas global memainkan peran penting dalam membingkai isu Yasuní sebagai persoalan keadilan lingkungan dan tanggung jawab global. Tekanan ini berkontribusi pada meningkatnya kesadaran publik dan legitimasi gerakan lingkungan.

Temuan penting lainnya adalah bahwa referendum nasional tahun 2023 menjadi titik balik dalam dinamika pelestarian lingkungan di Yasuní. Keputusan mayoritas publik untuk menghentikan eksploitasi minyak di Blok ITT menunjukkan adanya perubahan preferensi masyarakat terhadap perlindungan lingkungan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa implementasi hasil referendum masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait ketergantungan ekonomi terhadap minyak, keterbatasan alternatif pembangunan, dan kapasitas institusional negara.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan di Yasuní tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekologis, tetapi juga oleh struktur ekonomi, dinamika politik, dan relasi kekuasaan. Konflik yang terjadi mencerminkan ketegangan antara logika pembangunan berbasis ekstraksi dan kebutuhan keberlanjutan lingkungan, yang hingga saat ini masih belum sepenuhnya terselesaikan.

## Pembahasan

Temuan utama menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan di Taman Nasional Yasuní berada di bawah tekanan struktural akibat dominasi kebijakan ekstraktif yang dipengaruhi ketergantungan ekonomi terhadap minyak (Arsel & Pellegrini, 2024). Kondisi ini mencerminkan adanya imperatif ekstraktif dalam kebijakan negara yang sulit dihindari dalam konteks ekonomi berbasis sumber daya (Laastad, 2023). Tekanan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan tidak berdiri independen, tetapi terikat pada struktur ekonomi nasional (Pérez Rincón et al., 2019). Hal ini memperkuat argumen bahwa eksploitasi sumber daya menjadi strategi utama dalam pembangunan negara berkembang (Lessmann et al., 2016). Dengan demikian, pelestarian lingkungan menghadapi keterbatasan struktural dalam implementasinya (Brubaker, 2020).

Kondisi ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan negara, melainkan berada pada posisi subordinat terhadap kepentingan ekonomi (Bonikowski, 2019). Kebijakan negara cenderung menempatkan stabilitas fiskal sebagai tujuan utama dibanding perlindungan ekologis (Gidron & Hall, 2020). Hal ini menunjukkan adanya trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Norris & Inglehart, 2019). Dalam konteks ini, pelestarian lingkungan sering diposisikan sebagai agenda sekunder (Pappas, 2019). Kondisi tersebut

memperlihatkan ketimpangan prioritas dalam kebijakan publik (Rooduijn, 2019).

Dinamika tersebut dapat dijelaskan melalui relasi antara struktur ekonomi dan kebijakan negara yang mendorong eksploitasi sumber daya sebagai strategi pembangunan (Arsel & Pellegrini, 2024). Negara dengan ketergantungan tinggi pada sektor ekstraktif cenderung mengadopsi kebijakan yang mendukung eksploitasi (Laastad, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan sering kali dikompromikan demi kepentingan ekonomi (Lessmann et al., 2016). Selain itu, tekanan global terhadap permintaan energi turut memperkuat orientasi tersebut (Pérez Rincón et al., 2019). Dengan demikian, kebijakan ekstraktif menjadi bagian dari struktur ekonomi yang lebih luas (Brubaker, 2020).

Selain itu, lemahnya penerapan prinsip keadilan lingkungan dan dominasi pendekatan top-down memperkuat ketimpangan antara kepentingan negara dan masyarakat lokal (Villasante et al., 2025). Proses pengambilan keputusan yang tidak partisipatif menyebabkan marginalisasi masyarakat adat (Dayot, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan belum sepenuhnya inklusif (Tamufor et al., 2025). Ketimpangan ini memperkuat konflik sosial dalam pengelolaan sumber daya (Pérez Rincón et al., 2019). Dengan demikian, pendekatan kebijakan yang tidak partisipatif memperburuk kondisi lingkungan dan sosial.

Temuan ini memperluas studi sebelumnya yang lebih menekankan dampak ekologis dengan menunjukkan bahwa kebijakan negara merupakan faktor kunci dalam menentukan arah pelestarian lingkungan (Lessmann et al., 2016). Studi sebelumnya cenderung berfokus pada kerusakan lingkungan tanpa mengaitkan secara langsung dengan kebijakan (Kimerling, 2013). Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan memiliki peran sentral dalam membentuk dinamika tersebut (Arsel & Pellegrini, 2024). Dengan demikian, analisis kebijakan menjadi penting dalam studi lingkungan (Laastad, 2023). Hal ini memperkaya pendekatan dalam memahami konflik lingkungan.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang bersifat parsial, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara analisis kebijakan, aktor, dan dinamika sosial dalam memahami konflik lingkungan (Dayot, 2023). Pendekatan sebelumnya sering memisahkan aspek sosial dan ekologis (Pérez Rincón et al., 2019). Penelitian ini menggabungkan berbagai dimensi dalam satu kerangka analisis (Villasante et al., 2025). Hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif (Lessmann et al., 2016). Dengan demikian, pendekatan integratif memberikan kontribusi metodologis yang lebih kuat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan tidak dapat dicapai tanpa perubahan struktural dalam kebijakan ekonomi yang masih bergantung pada sektor ekstraktif (Arsel & Pellegrini, 2024). Ketergantungan ini menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan lingkungan (Laastad, 2023). Oleh karena itu, diperlukan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan (Pappas, 2019). Selain itu, reformasi kebijakan menjadi langkah penting dalam mendukung keberlanjutan (Rooduijn, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan struktural menjadi kebutuhan utama.

Temuan ini juga mengindikasikan bahwa keberhasilan konservasi memerlukan partisipasi masyarakat, penguatan institusi, serta integrasi antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Tamufor et al., 2025). Partisipasi masyarakat lokal menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan lingkungan (Villasante et al., 2025). Selain itu, institusi yang kuat diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan (Dayot, 2023). Integrasi kebijakan ekonomi dan lingkungan menjadi kunci dalam keberlanjutan (Pérez Rincón et al., 2019). Dengan demikian, pendekatan holistik diperlukan dalam pengelolaan lingkungan.

Penelitian ini mengisi kekosongan dengan menempatkan pelestarian lingkungan sebagai fokus

utama dalam analisis kebijakan ekstraktif, bukan sekadar sebagai dampak (Arsel & Pellegrini, 2024). Pendekatan ini berbeda dari studi sebelumnya yang lebih menekankan aspek ekologis (Lessmann et al., 2016). Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya analisis kebijakan dalam studi lingkungan (Laastad, 2023). Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru (Dayot, 2023). Hal ini memperkuat kontribusi dalam literatur akademik.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menghadirkan analisis yang terintegrasi antara kebijakan, dinamika sosial, dan faktor ekologis dalam konteks Yasuní (Pérez Rincón et al., 2019). Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konflik lingkungan (Villasante et al., 2025). Penelitian ini juga menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik (Tamufor et al., 2025). Hal ini memberikan kontribusi metodologis yang signifikan (Arsel & Pellegrini, 2024). Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian sosiologi lingkungan dan kebijakan publik.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dalam kebijakan ekstraktif di Taman Nasional Yasuní (2013–2023) berada di bawah tekanan struktural akibat dominasi kepentingan ekonomi berbasis minyak, sehingga kebijakan negara cenderung memprioritaskan eksploitasi dibanding konservasi. Temuan ini menegaskan bahwa pelestarian lingkungan belum menjadi fokus utama dalam kebijakan publik, melainkan dipengaruhi oleh relasi antara struktur ekonomi, dinamika politik, dan kekuasaan.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa kebijakan ekstraktif memiliki peran sentral dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pelestarian lingkungan. Secara praktis, temuan ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan, partisipatif, dan tidak bergantung pada sektor ekstraktif agar pelestarian lingkungan dapat tercapai secara efektif.

## Daftar Pustaka

- Arsel, M., & Pellegrini, L. (2024). Structural limits to effective environmental activism. *Geography and Environment*, 11(2). <https://doi.org/10.1002/geo2.150>
- Bass, M. S., Finer, M., Jenkins, C. N., et al. (2010). Global conservation significance of Ecuador's Yasuni National Park. *PLoS ONE*, 5(1), e8767. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.000876>
- Bonikowski, B. (2019). Populism and nationalism in a comparative perspective. *Annual Review of Sociology*, 45, 1–22. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073018-022629>
- Breskaya, O., Giordan, G., & Richardson, J. T. (2018). Human rights and religion: A sociological perspective. *Journal for the Scientific Study of Religion*, 57(3), 419–431. <https://doi.org/10.1111/jssr.12544>
- Brubaker, R. (2020). Populism and nationalism. *Nations and Nationalism*, 26(1), 44–66. <https://doi.org/10.1111/nana.12522>
- Dayot, J. (2023). Valuation struggles in the Ecuadorian Amazon. *Journal of Political Ecology*, 30(1). <https://doi.org/10.2458/jpe.2970>
- Eckersley, R. (2007). *Green theory*. Oxford University Press.
- Espinosa, C. (2013). The riddle of leaving the oil in the soil. *Forest Policy and Economics*, 36, 45–53. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2012.07.006>
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315834368>
- Finer, M., et al. (2009). Ecuador's Yasuni Biosphere Reserve. *Environmental Research Letters*, 4(3). <https://doi.org/10.1088/1748-9326/4/3/034005>
- Flyvbjerg, B. (2021). Five misunderstandings about case-study research. *Qualitative Inquiry*, 27(1), 1–15. <https://doi.org/10.1177/1077800420932406>
- Gidron, N., & Hall, P. A. (2020). Populism as a problem of social integration. *Comparative Political Studies*, 53(7), 1027–1059. <https://doi.org/10.1177/0010414019879947>
- Inglehart, R., & Norris, P. (2019). *Cultural backlash*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108595841>
- Joas, H. (2020). *The power of the sacred*. Oxford University Press.
- Kimerling, J. (2013). Oil, contact, and conservation in the Amazon. *Colorado Journal of International Environmental Law & Policy*.
- Laastad, S. G. (2023). Leaving oil in the ground. *Environment and Planning A*, 56(1), 172–189. <https://doi.org/10.1177/0308518x231184876>
- Larrea, C., & Warnars, L. (2009). Ecuador's Yasuni-ITT initiative. *Energy for Sustainable Development*, 13(3), 219–223. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2009.08.003>
- Leofreddi, A. (2023). Political secularism and religious freedom. *Religions*, 14(10), 1292. <https://doi.org/10.3390/rel14101292>
- Lessmann, J., Tamayo, J. A., & Muñoz, J. (2016). Oil industry expansion and biodiversity. *Ecology and Evolution*, 6(14), 4997–5012. <https://doi.org/10.1002/ece3.2099>
- Martin, P., & Scholz, I. (2014). Oil extraction and environmental conflict. *Energy Policy*, 68, 414–421.
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). *Populism: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Norris, P., & Inglehart, R. (2019). *Cultural backlash*. Cambridge University Press.
- Pappas, T. S. (2019). Populism and liberal democracy. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1200>
- Pérez Rincón, M. A., Vargas-Morales, J., & Martínez-Alier, J. (2019). Ecological distribution conflicts. *Ecological Economics*, 157, 80–91. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.11.004>
- Rights of Nature Tribunal. (2023). Yasuni-ITT case. <https://www.rightsofnaturetribunal.org>
- Rival, L. (2010). Ecuador's Yasuni-ITT initiative. *Energy Policy*.
- Rooduijn, M. (2019). State of the field: Populism. *Politics*, 39(3), 362–372. <https://doi.org/10.1177/0263395719867846>
- Smith, C. (2020). Religion and human flourishing. *Sociology of Religion*, 81(1), 1–20. <https://doi.org/10.1093/socrel/srz046>
- Stanley, B. (2018). Populism in political theory. *Journal of Political Ideologies*, 23(2), 1–15. <https://doi.org/10.1080/13569317.2018.1451226>
- Sovacool, B. K., & Scarpaci, J. (2016). Energy justice and petroleum politics. *Energy Policy*, 95, 158–171. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.04.045>
- Tamufor, N. E., Roth, R., & MacDonald, D. B. (2025). Biodiversity conservation policy reform. *Frontiers in Environmental Science*, 12. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2024.1434731>
- UNDP. (2012). Yasuni-ITT Initiative. <https://mptf.undp.org>

Villasante, S., Tovar Verba, J., & Relano, V. (2025). Indigenous rights and extractive conflicts. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7553135/v1>

Weyland, K. (2021). Populism as a political strategy. *Comparative Politics*, 53(2). <https://doi.org/10.5129/001041521X16135812068450>